Available online at **HISTORIA**: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah
Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

RESEARCH ARTICLE

Balinisasi dan Politik Representasi Kolonial: Konstruksi Bali sebagai "Museum Hidup" dalam Kebijakan Budaya Hindia Belanda

Ni Made Ariani, Putu Dyah Pradnya Paramitha
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
Correspondence Author: pradnya.paramitha@unud.ac.id

To cite this article: Ariani, N. M., & Paramitha, P. D. P. (2026). Balinisasi dan politik representasi kolonial: Konstruksi Bali sebagai "museum hidup" dalam kebijakan budaya Hindia Belanda. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 9*(1), 73-92. https://doi.org/10.17509/historia.v9i1.97592.

Naskah diterima : 26 Februari 2026, Naskah direvisi : 20 April 2026, Naskah disetujui : 30 April 2026

Abstract
Dutch colonial interest in Bali intensified only in the nineteenth century following military campaigns that culminated in the Puputan Badung (1906) and Puputan Klungkung (1908) wars. While previous studies have largely examined these events from political and military perspectives, the role of *Baliseering* as a colonial strategy of cultural governance remains underexplored. This study investigates how the *Baliseering* policy functioned to construct representations of Balinese culture as a means of consolidating colonial rule. Employing a critical historical method based on library research, the study analyzes secondary sources through Michel Foucault's theory of power relations and Stuart Hall's theory of cultural representation. The findings demonstrate that *Baliseering* transformed Bali into a "living museum," representing the island as an authentic, timeless, and culturally pure space. Rather than serving solely as a policy of cultural preservation, this representation legitimized colonial authority by regulating Balinese society and restricting the spread of modernity and nationalism. This study argues that the enduring global image of Bali as an exotic cultural landscape was not a natural cultural expression but a colonial construction produced through intertwined relations of power and knowledge. These findings contribute to colonial historiography by highlighting cultural representation as a central mechanism of colonial governance.

Keywords: *Baliseering*; Dutch Colonialism; Living Museum; Power Relations; Puputan War.

Abstrak
Kajian mengenai kolonialisme di Bali umumnya berfokus pada penaklukan militer dan Perang Puputan, sementara kebijakan *Baliseering* sebagai strategi representasi budaya kolonial masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan *Baliseering* digunakan sebagai instrumen kekuasaan kolonial dalam membentuk representasi budaya Bali pascapenaklukan tahun 1906–1908. Penelitian menggunakan metode sejarah kritis berbasis kajian pustaka dengan memanfaatkan buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu sebagai sumber utama. Analisis dilakukan menggunakan Teori Relasi Kuasa Michel Foucault dan Teori Representasi Budaya Stuart Hall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Baliseering* tidak semata-mata merupakan kebijakan pelestarian budaya, tetapi juga strategi kolonial untuk mengonstruksi Bali sebagai "museum hidup", yaitu ruang budaya yang autentik, statis, dan eksotis. Representasi tersebut berfungsi melegitimasi kekuasaan kolonial dengan mengendalikan masyarakat Bali, membatasi penetrasi modernitas dan nasionalisme, serta mempertahankan tatanan kolonial melalui produksi pengetahuan tentang kebudayaan lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa citra global Bali sebagai ruang budaya yang autentik bukanlah representasi yang alamiah, melainkan konstruksi kolonial yang dibentuk melalui relasi kuasa-pengetahuan. Temuan ini memperkaya historiografi kolonial dengan menegaskan bahwa representasi budaya merupakan mekanisme penting dalam praktik pemerintahan kolonial.

Kata Kunci : *Baliseering*; Kolonialisme Belanda; Museum Hidup; Perang Puputan; Relasi Kuasa.

PENDAHULUAN

Pada abad ke-18, sangat sedikit minat kolonial Belanda melirik Pulau Bali. Pemerintah Belanda hanya melihat pulau Bali sebagai wilayah periferal yang tidak strategis secara ekonomi maupun geopolitik (Nordholt, 1996). Ketidaktertarikan Belanda terhadap Bali dikarenakan wilayah ini tidak memiliki komoditas ekspor bernilai tinggi seperti rempah-rempah. Struktur politik Bali yang terfragmentasi dalam banyak kerajaan kecil juga dianggap menyulitkan kontrol kolonial (Nordholt, 1996). Posisi Bali yang berada di luar jalur perdagangan internasional utama menimbulkan risiko biaya tinggi dibanding potensi keuntungan. Dalam situasi abad ke-18, Bali dipandang lebih relevan untuk dijalin hubungan dagang biasa (seperti perdagangan budak dan candu) daripada menjadi sasaran utama ekspansi atau administrasi kolonial. Hal ini membuat Bali tetap bertahan dalam struktur politik berbasis kerajaan dan sistem adat yang kuat (Lowe, 2005).

Dalam peta historiografi kolonial Hindia Belanda, posisi Bali menempati lokus yang sangat krusial sekaligus paradoks. Bali bukan sekadar objek penaklukan teritorial, melainkan laboratorium konseptual di mana politik, kebudayaan, dan pariwisata kolonial berkelindan membentuk sebuah proyek hegemoni yang unik. Berbeda dengan Jawa yang dikuras secara ekonomi melalui sistem tanam paksa, atau Sumatra yang dieksploitasi melalui perkebunan skala besar, Bali dikaji dan dikelola melalui romantisasi kebudayaan. Kajian terhadap Bali dalam historiografi kolonial menjadi penting karena pulau ini menjadi titik balik krusial yaitu kegagalan militeristik Barat bertransformasi menjadi keberhasilan diskursif. Di sinilah pariwisata kolonial tidak lahir dari ruang hampa, melainkan sengaja diproduksi sebagai kelanjutan dari penaklukan politik yang dibungkus oleh estetika timur (orientalisme). Oleh karena itu, melacak dinamika peralihan motif kolonial di Bali menjadi pintu masuk penting untuk memahami bagaimana imperium Barat menggeser modus operandinya dari dominasi fisik menuju dominasi epistemik.

Baru sejak abad ke-19, Belanda mulai terusik dengan hukum tawan karang atau melayar kampih yang diterapkan oleh kerajaan di Bali terutama Buleleng, Gianyar dan Badung. Berbagai laporan tentang penjarahan kapal yang merugikan diterima oleh Belanda (Jordaan, 1980; Van der Kraan, 1985). Hal ini tentu membuat Belanda tidak tinggal diam. Bali mulai mendapat perhatian Belanda untuk di "ditertibkan" melalui berbagai perjanjian. Mulanya, kerajaan di Bali menyetujui perjanjian dengan pemerintah Belanda. Dalam perjalanan, ternyata praktik hukum tawan karang tetap dilakukan. Pelanggaran perjanjian ini membuat Belanda mulai melakukan penyerangan militer ke Bali. Mulanya Belanda menyerangan Buleleng pada 1846 hingga puncaknya pada 1906 kerajaan Badung dan 1908 sesuhunan kerajaan Klungkung kalah dalam perang puputan. Akhirnya, Bali jatuh ke tangan Belanda dan membuka jalan untuk penetrasi politik kolonial. Penaklukan kolonial tidak hanya bersifat militer, tetapi juga menyentuh dimensi simbolik dan magis dalam struktur kekuasaan Bali (Wiener, 1995).

Setelah berakhirnya Perang Puputan Badung (1906) dan Puputan Klungkung (1908), posisi Bali memasuki fase baru. Kekalahan kerajaan Badung dan Klungkung menandai runtuhnya kedaulatan politik lokal sekaligus menjadi simbol hadirnya kekuasaan kolonial secara penuh di Pulau Bali. Di balik jatuhnya Bali, penaklukan berdarah ini justru mendatangkan konsekuensi serius bagi Belanda. Tindakan militer yang memicu perang puputan—atau berjuang sampai titik darah penghabisan—menimbulkan gelombang kecaman internasional (Picard, 2006). Kritik tajam datang dari pers Eropa serta kalangan humanis Belanda sendiri yang mengecam operasi militer tersebut sebagai bentuk kekejaman dan penaklukan barbar. Kritik ini menempatkan pemerintah kolonial dalam tekanan moral dan diplomatik internasional yang berat. Kecaman global inilah yang mengakibatkan kolonial Belanda terdorong mengubah pendekatan mereka secara radikal: dari dominasi militer yang destruktif ke strategi kebudayaan yang lebih halus.

Untuk mengatasi citra negatif, meredam kecaman internasional, sekaligus mengantisipasi resistensi lokal, pemerintah kolonial menerapkan strategi pengelolaan budaya yang dikenal sebagai *Baliseering* atau Balinisasi. Program ini muncul sebagai respons politik dan propaganda terhadap Bali. Kolonial Belanda mulai mempromosikan diri sebagai "pelindung sejati budaya Bali". Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan kebudayaan lokal seolah-olah rapuh dan perlu dijaga ketat dari pengaruh luar, terutama arus modernitas Barat yang merusak serta ekspansi Islamisasi dari Pulau Jawa. Melalui *Baliseering*, kebudayaan Bali dipertahankan dan diatur dalam bentuk yang dianggap "asli", "eksotik", dan "spiritual".

Konstruksi Bali sebagai wilayah eksotik yang berbeda dari Jawa maupun Barat ini dapat dibaca melalui kerangka orientalisme, di mana Timur diproduksi sebagai ruang imajinatif yang romantik sekaligus inferior dalam wacana kolonial (Said, 1978). Kebudayaan Bali kemudian disesuaikan dengan imajinasi orientalis

kolonial tersebut. Regulasi adat, ritual, arsitektur, hingga pakaian tradisional ditata ulang dalam kerangka birokrasi kolonial. Pelestarian budaya kemudian digunakan sebagai sarana untuk memproduksi legitimasi politik. *Baliseering* menjadi strategi legitimasi kekuasaan untuk menutupi penaklukan berdarah dalam narasi kolonial yang seolah-olah humanis.

Melalui *Baliseering*, Pulau Bali kemudian dikonstruksi menjadi "museum hidup" (l*iving museum*), sebuah pulau yang harmonis dan memiliki kebudayaan yang asli dan kuno. Pengertian Bali sebagai museum hidup mencerminkan ambisi kolonial agar Bali harus dijaga agar tetap statis dan tidak berubah. Maksudnya, Bali diusahakan menjadi ruang bagi tradisi dan ritual terus berlangsung tanpa tersentuh atau terpengaruh proses modernisasi sekuler. Maka, Bali dianggap tidak memerlukan pengaruh global modernisasi; justru Bali dikonstruksi agar mempertahankan keasliannya yang beku dalam waktu. Narasi tersebut memiliki daya tarik estetis yang tinggi sekaligus mendukung agenda kolonial yang ingin memisahkan identitas Bali dari wilayah Nusantara lainnya.

Konsep Bali sebagai museum hidup sangat berarti untuk kepentingan kolonial karena menjadikan intervensi kekuasaan menjadi lebih halus dalam bidang budaya. Penegasan terhadap perlindungan budaya Bali membuat kolonial mendapat legitimasi mutlak untuk mengendalikan dan mengatur kehidupan masyarakat Bali. Padahal, pelestarian budaya ini hanyalah topeng dari politik pasifikasi yang dijalankan kolonial. Dalam arti yang lebih luas, stabilitas sosial dan citra estetis digunakan untuk menjaga keutuhan budaya Bali yang kemudian menjadi cetak biru bagi pengembangan pariwisata. Citra Bali sebagai museum hidup ternyata sangat berguna untuk strategi promosi pariwisata oleh kolonial. Pada awal tahun 1930-an, pemerintah Belanda bersama berbagai aktor seniman Eropa dan biro perjalanan (KPM) memasarkan Bali sebagai surga yang tidak tersentuh modernitas. Promosi yang demikian menjanjikan membuat wisatawan Eropa datang dengan ekspektasi tinggi (Vickers, 1989b). Mereka ingin menyaksikan secara langsung keindahan pulau surga yang masih asli. *Baliseering* yang mengemas Bali sebagai museum hidup sukses menjadi panggung estetis yang dibentuk oleh kekuasaan kolonial (Picard, 2006; Hitchcock et al., 1993).

Dalam kajian heritage studies kontemporer, warisan budaya tidak lagi dipahami sebagai peninggalan masa lalu yang bersifat netral, tetapi sebagai hasil konstruksi politik yang menentukan budaya mana yang dianggap bernilai dan layak dilestarikan. Smith (2006) menyebut proses tersebut sebagai *Authorized Heritage Discourse* (AHD), yaitu mekanisme ketika negara atau kelompok dominan menentukan definisi resmi mengenai keaslian (*authenticity*) dan identitas budaya. Dalam konteks kolonial, proses tersebut tidak hanya berfungsi melestarikan budaya lokal, tetapi juga menjadi instrumen legitimasi kekuasaan melalui pengendalian representasi masyarakat jajahan. Perspektif ini memungkinkan kebijakan *Baliseering* dipahami bukan sekadar sebagai proyek konservasi budaya, melainkan sebagai bagian dari praktik pemerintahan kolonial yang membentuk identitas Bali sesuai kepentingan politik kolonial (Smith, 2006; Waterton & Smith, 2010).

Meskipun tema kebudayaan dan pariwisata Bali era kolonial telah banyak dikaji, terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) yang belum dieksplorasi secara memadai. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Vickers (1989a) dan Picard (2006) telah berhasil melacak bagaimana pariwisata Bali lahir dari proses "penemuan kembali" kebudayaan oleh para orientalis dan biro perjalanan Barat. Di sisi lain, Schulte Nordholt (1996) dan Wiener (1995) lebih berfokus pada transisi politik dari masa dinasti kerajaan menuju integrasi administrasi kolonial pasca-Perang Puputan. Namun, literatur-literatur tersebut cenderung melihat kebijakan *Baliseering* dan konstruksi "museum hidup" sebagai produk pelestarian yang pasif atau sekadar komoditas ekonomi pariwisata awal. Belum ada studi sejarah yang secara spesifik menempatkan konsep "museum hidup" ini sebagai sebuah instrumen taktis kekuasaan yang bekerja secara diskursif. Terdapat keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana estetitisasi budaya digunakan secara aktif sebagai perangkat guilt management (pengelolaan rasa bersalah) politik Belanda untuk menjinakkan potensi radikalisme nasionalisme modern pasca-Puputan.

Di sinilah artikel ini menempatkan posisi dan kontribusinya. Artikel ini tidak lagi melihat *Baliseering* sebagai proyek pariwisata atau pelestarian adat yang netral, melainkan sebagai sebuah "teknologi kekuasaan" (*technology of power*) dalam perspektif Michel Foucault dan "representasi stereotipikal" dalam teori Stuart Hall. Kontribusi utama tulisan ini adalah membongkar operasi relasi kuasa-pengetahuan kolonial yang sengaja membekukan dinamika sosial Bali demi kepentingan kontrol geopolitik. Penelitian ini menguraikan wacana "museum hidup" diproduksi, dilembagakan, dan dipaksakan secara administratif.

Dalam naungan program *Baliseering*, konstruksi Bali sebagai museum hidup memiliki implikasi budaya, sosial, dan politik yang signifikan. Pada satu sisi, program ini mendorong pelestarian unsur budaya, namun di sisi lain, hal ini justru membatasi perkembangan dan inovasi budaya secara internal. Perubahan dianggap sebagai ancaman terhadap citra museum hidup, sehingga kolonial memiliki otoritas absolut untuk menentukan hal yang harus dipertahankan atau diubah. Dengan menelaah konteks masuknya kolonialisme Belanda, konsep *Baliseering*, dan konstruksi Bali sebagai museum hidup, latar belakang ini menunjukkan bahwa citra Bali sebagai ruang tradisi statis merupakan konstruksi yang lahir dari kepentingan kolonial.

Untuk itu, relevansi *Baliseering* sebagai upaya kolonial menjadikan Bali sebagai museum hidup dalam studi sejarah menjadi penting. Hal ini dikarenakan identitas budaya Bali ternyata tidak hanya dibentuk oleh dinamika internal masyarakat, namun juga oleh intervensi diskursif kolonial. Dengan memposisikan kebudayaan sebagai objek yang harus dipreservasi, kolonial menciptakan suatu konstruksi identitas yang mengabaikan fakta bahwa budaya bersifat dinamis. *Baliseering* menjadi contoh historis yang penting mengenai bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi cara suatu komunitas dipahami oleh dunia luar maupun oleh masyarakatnya sendiri. Pemahaman historis atas proses ini menjadi krusial, tidak hanya untuk mengungkap praktik kolonial masa lalu, tetapi juga untuk menganalisis warisan kolonial yang masih terus mempengaruhi persepsi global dan komodifikasi pariwisata Bali hingga hari ini.

Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan suatu rumusan masalah dalam studi ini yaitu ditemukan permasalahan upaya kolonial menjadikan Bali sebagai museum hidup dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat. Masalah tersebut perlu dikaji secara historis dengan mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kolonialisme Belanda mengubah strategi dominasi dari kekerasan militer menjadi kontrol budaya di Bali?
2. Bagaimana kebijakan Balinisasi membentuk konstruksi Bali sebagai museum hidup?
3. Apa implikasi dari upaya kolonial Belanda menjadikan Bali sebagai museum hidup?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah kritis (*historical-critical research*) berpola kualitatif-deskriptif yang berupaya membongkar motif ideologis dan relasi kuasa kolonial di balik kebijakan *Baliseering* di Bali. Tahapan penelitian diawali dengan langkah heuristik. Adapun sumber yang digunakan adalah sumber yang dikombinasikan dengan literatur sekunder otoritatif, meliputi karya Anak Agung Gde Agung (Bali Abad XIX) untuk merekonstruksi kronologi kejatuhan politik Bali pasca-Puputan, karya Michel Picard (Budaya Pariwisata dan Pariwisata Budaya) untuk memetakan standardisasi kebudayaan demi pariwisata, serta artikel Nana Supriatna (Living Museum) guna membedah manifestasi konkret isolasi politik berkedok pelestarian budaya. Seluruh data yang terkumpul kemudian diuji melalui kritik sumber (verifikasi); kritik eksternal diterapkan untuk menguji otentisitas dokumen fisik, sementara kritik internal dilakukan dengan menyilangkan (*cross-checking*) narasi orientalis kolonial terhadap perspektif historiografi kritis Indonesia guna mereduksi bias penulisan sejarah.

Pada tahap selanjutnya, dilakukan interpretasi dengan menganalisis fakta-fakta sejarah yang telah terverifikasi menggunakan teknik sintesis-analitis berbasis Teori Relasi Kuasa Michel Foucault dan Teori Representasi Stuart Hall. Melalui kerangka ini, peneliti mengaitkan fakta kekalahan militer Bali dengan kemunculan program penjinakan kultural *Baliseering*, yang dibongkar sebagai sebuah pergeseran wacana (*discursive shift*) dan teknologi kekuasaan kolonial. Berbagai bukti material seperti modifikasi relief pura hingga pembatasan kurikulum pendidikan lokal diinterpretasikan secara kritis sebagai instrumen isolasi politik yang sengaja diterapkan Belanda untuk membendung arus nasionalisme dari Pulau Jawa. Rangkaian penafsiran tersebut akhirnya disusun secara sistematis-kronologis dalam tahap historiografi. Hasil penulisan ini berhasil mendekonstruksi wacana "museum hidup" dan membuktikan bahwa citra eksotis Bali yang statis merupakan produk dari konstruksi relasi kuasa-pengetahuan kolonial yang warisannya masih memengaruhi persepsi global hingga hari ini.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena seluruh analisis didasarkan pada sumber-sumber sekunder yang tersedia dalam literatur akademik. Ketiadaan penggunaan arsip kolonial asli, dokumen administratif pemerintah

Hindia Belanda, maupun sumber lisan menyebabkan penelitian ini bergantung pada interpretasi para penulis terdahulu. Meskipun telah dilakukan pembacaan kritis dan perbandingan berbagai perspektif historiografis, temuan penelitian tetap dipengaruhi oleh cakupan dan karakter sumber sekunder yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang memanfaatkan arsip primer kolonial maupun sumber lokal Bali diperlukan untuk memperkaya dan menguji kembali temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penaklukan Kolonial Belanda di Bali

Suasana kompetisi menyelimuti suasana geopolitik Belanda dan Inggris pada abad ke-18 (Ricklefs, 2008; Tarling, 1992). Dalam kompetisi tersebut, Belanda dan Inggris saling memperebutkan pengaruh di kawasan timur Nusantara. Kondisi ini mendorong kolonial Belanda mulai memperhatikan pulau di bagian Timur Jawa terutama Bali (Reid, 2015). Hal ini dilakukan untuk melindungi dan mengkonsolidasikan kepentingan Belanda di Jawa dari campur tangan Inggris setelah Perang Napoleon (Howe, 2005). Struktur politik Bali pra-kolonial sering dipahami sebagai "negara teater", di mana kekuasaan dipertontonkan melalui ritual dan simbol (Geertz, 1980). Mulanya, Bali berada dalam posisi yang relatif otonom. Sebuah pulau yang terdiri atas kerajaan dengan raja sebagai pemimpinnya. Struktur politik Bali pra-kolonial sering digambarkan sebagai konfigurasi kerajaan-kerajaan yang berdaulat dengan sistem patronase kompleks dan legitimasi berbasis kosmologi Hindu-Bali (Pringle, 2004; Taylor, 2009). Semua kerajaan ini memberi kewenangan pusat kepada kerajaan Klungkung yang disebut sebagai sesuhunan. Dalam mengelola wilayah kerajaan, selain sumber hasil bumi, Bali juga memiliki sumber dan maritim dan hubungan dagang yang signifikan.

Pada awal abad ke-19 wilayah Singapura berkembang menjadi pusat perdagangan besar di Asia (Tarling, 1992). berbagai kapal dagang besar mendarat di Pelabuhan Singapura. Ketika itu, Bali salah satu wilayah yang tergabung dalam perdagangan internasional melalui jalur Singapura. Para pedagang Cina, Bugis, Mandar dan Melayu menjadi tokoh dalam perdagangan Singapura-Bali. Hasil bumi dari Bali dibawa oleh para pedagang ke Singapura. Beberapa hasil bumi tersebut adalah beras, minyak, kelapa, tembakau, kulit sapi, kapas, telor asin hingga kain tenun. Selanjutnya pedagang membawa barang seperti candu, senjata, mesiu, obat, timah, sutera hingga benang emas ke Bali. Selain hasil bumi, Bali juga dikenal sebagai pusat perdagangan budak yang diminati oleh pedagang asing. Budak belian dari Bali kerap dijadikan tenaga kerja. Perdagangan budak dari Bali cukup diminati orang asing. Hal ini dikarenakan banyak budak belian yang telah terbukti rajin dan tekun dalam mengerjakan tugasnya. Peminat budak belian dari Bali banyak berasal dari Batavia hingga Pulau Bourbon dan Pulau Mauritius (Agung, 1988).

Sejalan dengan ramainya perdagangan di Bali, terdapat hukum kedaulatan perairan yang dimiliki oleh kerajan di Bali. Sebuah hukum yang bernama tawan karang atau melayar kampih. Isi dari hukum ini yakni mengizinkan kerajaan di wilayah perairan untuk merampas muatan kapal yang karam. Hukum tawan karang memiliki fungsi sebagai instrumen dalam mengatur lalu lintas perdagangan maritim. Hukum ini menjadi kontrol atas hubungan ekonomi dengan kapal yang berlabuh atau melintasi jalur laut kerajaan di Bali. Tentunya hukum tawan karang sangat menguntungkan kerajaan Buleleng, Karangasem, Jembrana dan Badung. Posisi kerajaan tersebut sangat strategis dalam jalur perdagangan baik dengan pulau jawa atau internasional seperti Singapura. Kerajaan di Bali sering mendapat barang berharga dari kapal karam, tenggelam, rusak karena cuaca atau konflik. Praktik hukum tawan karang menjadikan kerajaan di Bali memiliki posisi politik yang kuat dalam jaringan perdagangan. Namun demikian, tawan karang ternyata menjadi celah masuknya kolonial di Bali. hukum ini menimbulkan ketegangan antara kerajaan di Bali dengan pihak asing. Pedagang luar bahkan pemerintah kolonial Belanda menganggap praktik tersebut sangat merugikan kepentingan komersial. Hal ini menjadikan hukum tawan karang sebagai alasan pemerintah kolonial untuk melakukan intervensi militer di Pulau Bali.

Sejak 1818, praktik hukum tawan karang di Bali menarik perhatian Belanda karena merugikan kepentingan mereka. Beberapa peristiwa, seperti perampasan muatan kapal Belanda di Badung dan Kuta, mendorong Belanda untuk menertibkan praktik tersebut melalui perjanjian dengan raja-raja Bali. Antara 1842–1843, Belanda menjalin kerja sama dengan raja-raja Badung, Karangasem, Buleleng, Klungkung, dan Tabanan untuk menghapus tawan karang. Namun, Buleleng dan Karangasem masih melakukannya hingga 1844, sehingga Belanda menuntut ganti rugi kepada Raja Buleleng. Penolakan tuntutan ini memicu serangan kolonial Belanda terhadap Kerajaan Buleleng. Pada 28 Juni 1846, Belanda menyerang dengan pasukan

besar dan persenjataan modern. Ketika itu Belanda berhasil merebut Kota Singaraja. Raja Buleleng dan Patihnya mundur ke Jagaraga dan akhirnya dipaksa menandatangani perjanjian pada 6 Juli 1846 yang mewajibkan penghancuran benteng, pembayaran ganti rugi, serta mengizinkan Belanda menempatkan pasukan di Buleleng.

Raja Buleleng berpura-pura mematuhi perjanjian dengan Belanda sambil mempersiapkan perlawanan. Praktik hukum tawan karang terus terjadi, contohnya perampasan muatan kapal Hindia Belanda di Pantai Lirang (1846) dan kapal berbendera Inggris di Pantai Kusamba (1847). Hal ini tentunya memicu kemarahan Belanda. Ultimatum Belanda kepada Raja Buleleng, Karangasem, dan Klungkung diabaikan, sehingga Belanda melancarkan serangan pada 8 Juni 1848 dan menduduki Desa Bungkulan. Serangan ke Benteng Jagaraga pada 9 Juni 1848 berhasil dipatahkan oleh pasukan Buleleng di bawah Patih Jelantik dengan strategi supit urang. Kekalahan ini menyebabkan Belanda terpaksa mundur. Meski demikian Belanda kembali melakukan serangan balasan dalam skala besar pada April 1849. Penyerangan ini berhasil merebut Benteng Jagaraga dan membunuh Raja Buleleng. Terbunuhnya Raja Buleleng pada 16 April 1849 menandai jatuhnya kedaulatan Kerajaan Buleleng ke tangan kolonial Belanda (Agung, 1988).

Pada 1 Juli 1880, Belanda membentuk Keresidenan Bali dan Lombok yang berkedudukan di Singaraja dengan wilayah kekuasaan terbatas pada Buleleng dan Jembrana. Setelah kekuasaannya stabil, Belanda melakukan pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan Buleleng, kantor pemerintahan, dan jalan akses baru. Pembangunan ini mengubah tata ruang tradisional Buleleng serta mendorong pesatnya pertumbuhan perdagangan di Pelabuhan Buleleng melalui sistem bongkar muat kapal besar di tengah laut. Sejak 1880, Belanda hanya terfokus dalam urusan di wilayah Buleleng dan tidak melakukan ekspansi penaklukan di wilayah Bali Selatan. Situasi berubah setelah kapal dagang Sri Kumala milik pedagang Cina karam di Desa Tangtu dekat Sanur pada 27 Mei 1904 (Agung, 1988). Peristiwa ini dimanfaatkan Belanda sebagai alasan untuk kembali melanjutkan ekspansi kolonialnya dengan menjadikan Kerajaan Badung sebagai sasaran utama. Setelah kapal karam, Raja Badung memerintahkan rakyatnya untuk mengamankan muatan kapal. tampaknya, pemilik kapal, Kwee Tek Tjiang menyatakan bahwa rakyat Sanur telah merampas muatan kapalnya. tuduhan tanpa disertai bukti tentunya dibantah oleh rakyat Sanur. Setelah melakukan pemeriksaan, Raja Badung menolak klaim kerugian tersebut karena meyakini kejujuran rakyatnya.

Merasa tidak puas, Kwee Tek Tjiang mengadukan perkaranya kepada residen Belanda, J. Eschbach. Residen kemudian memaksa Raja Badung membayar ganti rugi sebesar 3000 ringgit. Belanda mengeluarkan ultimatum agar tuntutan tersebut dipenuhi paling lambat 5 Januari 1905. Respon Raja Badung terhadap ultimatum tersebut adalah menolak dengan tegas. Raja Badung berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan dan kedaulatan kerajaan. penolakan tersebut mendorong Belanda memberlakukan blokade ekonomi terhadap Kerajaan Badung. Blokade terutama melalui jalur laut berlangsung di bawah pimpinan H.J.E.F. Schwartz. Blokade ini bertujuan menghentikan aktivitas perdagangan dan melemahkan perekonomian Badung.

Kenyataannya, blokade tidak berhasil membuat kerajaan Badung tunduk pada kolonial. Hubungan kerajaan Badung dan Kolonial menjadi semakin tegang. Berbagai upaya penyelesaian secara damai gagal dilakukan. Gubernur Jenderal Van Heutsz kembali mengajukan tuntutan ganti rugi yang lebih besar disertai ancaman tindakan militer. Raja Badung tetap menolak tuntutan tersebut karena menilai persoalan utama bukanlah uang melainkan kedaulatan kerajaan. Akibatnya, Belanda memilih jalur militer dan mengirim ekspedisi pada September 1906. Pasukan Belanda mendarat di Sanur dan bergerak menuju pusat Kerajaan Badung. Serangan militer mampu menaklukkan wilayah pesisir Puri Denpasar. Pasukan Belanda terus bergerak maju hingga berhasil menduduki Denpasar pada 20 September 1906.Dalam kondisi terdesak, Raja Badung dan pengikutnya di Puri Denpasar melakukan perlawanan terakhir secara puputan yaitu berjuang hingga titik darah penghabisan. Raja dan keluarganya bergerak maju menghadapi tentara Belanda dengan menghunuskan keris dan senjata tradisional. Peluru pasukan Belanda menembakkan setiap orang yang melangkah maju. Dalam waktu singkat raja tertembak dan meninggal dunia. Begitu pula dengan seluruh anggota keluarga kerajaan yang lainnya. Orang yang tidak tertembak memilih menikam dirinya. Setelah menaklukkan Puri Denpasar, rombongan tentara kolonial kemudian bergerak ke Puri Pemecutan. Raja dan keluarga Puri Pemecutan juga mengambil langkah yang sama yakni maju menghadapi tentara Belanda. Rangkaian peluru menembak Raja dan keluarga Puri Pemecutan. Kekalahan yang tidak dapat dielakkan menandai runtuhnya Kerajaan Badung dan jatuhnya wilayah tersebut ke tangan Belanda (Agung, 1988).

Kejatuhan Kerajaan Badung pada 20 September 1906 mendorong Belanda menjadikan Kerajaan Klungkung sebagai sasaran selanjutnya. Kerajaan Klungkung diincar dalam posisinya sebagai pusat simbolik kerajaan-kerajaan Bali. Namun, Belanda tidak langsung melakukan serangan militer karena Dewa Agung Klungkung bersedia menandatangani perjanjian pada 17 Oktober 1906 di Gianyar. Perjanjian ini secara signifikan mengurangi kedaulatan Klungkung akibat campur tangan Hindia Belanda dalam pemerintahan. Sesuai perjanjian tersebut, pasukan Belanda bebas melakukan patroli dan melakukan pameran kekuatan di wilayah Klungkung. Tindakan ini hampir memicu bentrokan di Desa Gelgel ketika Cokorde Gelgel berniat menyerang pasukan Belanda, namun berhasil dicegah oleh Dewa Agung yang segera mengambil langkah pengamanan. Untuk sementara, konflik terbuka dapat dihindari.

Meski berupaya menghindari konfrontasi, Dewa Agung tetap dicurigai Belanda. Kecurigaan ini muncul ketika blokade kerajaan Badung, wilayah Sibang dan Abiansemal yang berada di bawah pengaruh Klungkung nyatanya mengirim barang dagangan ke Badung. Selain itu, Klungkung menjadi tempat pelarian para pesakitan dari wilayah kekuasaan Belanda, dan penolakan Dewa Agung untuk menyerahkan mereka semakin meruncingkan hubungan kedua pihak. Sumber konflik yang paling serius adalah kebijakan monopoli perdagangan candu. Sebelum campur tangan Belanda, perdagangan candu di Bali dikelola kerajaan dan menjadi sumber pendapatan utama raja melalui bea masuk. Candu juga bebas diperjualbelikan dan bahkan diselundupkan ke Jawa, sangat berbeda dengan kebijakan ketat Belanda di wilayah Jawa (Agung, 1988).

Pada 1 April 1908, Belanda secara resmi memberlakukan monopoli perdagangan candu di Bali dan merencanakan pembukaan kantor penjualan candu secara resmi. Kebijakan ini memicu penolakan luas karena merugikan raja dan membatasi kebebasan masyarakat. Salah satu bentuk perlawanan muncul dari Gusti Gede Putu, yang kemudian diasingkan oleh residen Belanda untuk meredam ketegangan. Belanda kemudian mendatangkan petugas dari Jawa untuk mengelola penjualan candu melalui Opium Regie. Namun, kebijakan ini justru memicu perlawanan terbuka, khususnya di Klungkung. Residen G.F. de Bruyn Kops menilai perlu adanya penambahan pasukan karena situasi keamanan semakin memburuk (Agung, 1988).

Pada 16 April 1908, kantor penjualan candu di Gelgel diserang oleh Cokorde Gelgel. Peristiwa ini menewaskan seorang petugas Belanda. Bentrokan berlanjut hingga 17 April 1908 dan menyebabkan banyak korban di pihak kerajaan Klungkung dan Belanda. Belanda kemudian berhasil menduduki Puri Gelgel, sementara pemerintah kolonial segera meminta tambahan pasukan untuk menindaklanjuti perlawanan ini. Setelah Puri Gelgel jatuh, Cokorde Gelgel melarikan diri ke Puri Klungkung dan mendorong Dewa Agung untuk melawan Belanda. Pada 28 April 1908, pasukan Belanda tiba di Kota Klungkung dan mengepung areal puri. Dewa Agung beserta keluarga dan pengikutnya kemudian melakukan perlawanan terakhir menggunakan tombak untuk menghadapi Belanda secara langsung. Perlawanan secara puputan dilakukan hingga akhirnya Raja Klungkung dan keluarganya gugur. Peristiwa Puputan Klungkung 1908 menandai jatuhnya Kerajaan Klungkung sekaligus berakhirnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Bali di bawah kolonial Belanda (Agung, 1989).

Gugurnya Dewa Agung beserta seluruh keluarga kerajaan dalam Puputan Klungkung 1908 tidak sekadar menandai runtuhnya kedaulatan politik lokal secara absolut, melainkan membawa dampak geopolitik dan psikologis yang masif bagi eksistensi legitimasi kolonial Belanda. Secara internal, perang puputan mengakibatkan terjadinya dekapitasi struktural—yaitu hilangnya seluruh lapisan elite penguasa tradisional Bali yang selama ini menjadi poros kosmologi masyarakat. Puri-puri yang hancur dibakar tidak hanya meninggalkan puing material, tetapi juga menghancurkan tatanan "negara teater" (Geertz, 1980) yang mengandalkan simbol spiritual raja.

Namun, dampak yang paling memukul Batavia dan Den Haag justru lahir dari medan opini publik global. Berita mengenai ribuan pria, wanita, dan anak-anak bangsawan Bali berpakaian putih yang memilih menusuk diri dengan keris atau menerjang desingan peluru modern senapan Mannlicher tentara KNIL segera menyebar ke Eropa. Foto-foto mayat yang bertumpuk di halaman Puri Denpasar dan Klungkung memicu gelombang kecaman internasional yang destruktif bagi citra Belanda. Pers humanis di Eropa menuduh pemerintah kolonial melakukan pembantaian barbar (*slaughter*) demi keuntungan komersial candu dan monopoli maritim. Tekanan diplomatik ini mengancam posisi Belanda di mata dunia internasional yang saat itu sedang gencar mempromosikan citra "beradab".

Krisis legitimasi pasca-Puputan inilah yang memaksa institusi kolonial melakukan pergeseran strategi kekuasaan secara radikal. Otoritas kolonial menyadari bahwa penaklukan militer secara telanjang

(*naked power*) tidak lagi dapat dipertahankan karena memicu resistensi lokal yang fatalistik sekaligus isolasi diplomatik global. Sebagai bentuk pengelolaan rasa bersalah (*guilt management*) dan pemulihan citra publik, pemerintah kolonial mengubah modus operandinya dari dominasi koersif (kekerasan senjata) menjadi dominasi hegemoni diskursif (kebudayaan). Senjata militer segera dialihfungsikan menjadi perangkat administratif-birokratis yang dikemas dalam bentuk Politik Etis dan sistem pemerintahan tidak langsung (*zelfbestuur*).

Dalam fase transisi ini, kebudayaan Bali yang semula dianggap menghambat modernitas kolonial (seperti praktik tawan karang dan kebebasan niaga candu), mendadak didefinisikan ulang sebagai komoditas yang "rapuh, luhur, dan wajib dilindungi". Belanda menghentikan ekspansi fisik dan beralih membangun narasi propaganda baru: mereka memposisikan diri bukan lagi sebagai penakluk berdarah, melainkan sebagai "pelindung tunggal" peradaban Hindu-Bali. Perubahan strategi inilah yang melahirkan program *Baliseering* (Balinisasi). Melalui kebijakan ini, instrumen kekuasaan tidak lagi bekerja dengan menembakkan peluru ke tubuh fisik masyarakat Bali, melainkan dengan memproduksi pengetahuan, merestrukturisasi hukum adat, menstandarisasi ritual, dan membekukan ruang sosial Bali menjadi sebuah "museum hidup" yang statis demi kepentingan pariwisata kolonial.

2. Kebijakan Etis dan Implementasi Kebijakan Balinisasi oleh Pemerintah Kolonial

Penaklukan berdarah Kerajaan Badung dan Klungkung dalam perang menimbulkan citra negatif bagi Belanda di mata internasional (Howe, 2005). Citra ini muncul akibat menyebarnya laporan dan foto dari perang puputan di Bali. Belanda dianggap menyerang rakyat tradisional menggunakan senjata modern. Kritik dari pers Eropa dan publik internasional terus muncul dan menekan Belanda. Tekanan juga datang dari internal rakyat Bali, yaitu Belanda harus menghadapi struktur adat masyarakat yang kompleks. Untuk itu, Belanda berupaya untuk memperbaiki citra mereka di mata internasional. Sejalan dengan upaya mempertahankan kekuasaan dalam kompleksitas masyarakat Bali. Sebelum penaklukan kerajaan di Bali, Belanda ternyata telah menerima kecaman serupa.

Kecaman muncul dari berbagai kalangan di Eropa, seperti kaum humanis, tokoh agama, dan politisi progresif. Mereka mengkritik keras kebijakan tanam paksa serta penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Jawa. Sistem Tanam Paksa atau cultuurstelsel diberlakukan Belanda di Hindia Belanda sejak 1830 untuk mengatasi krisis ekonomi akibat Perang Diponegoro dan konflik di Belgia. Penduduk Jawa diwajibkan menyerahkan sekitar 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila bagi pemerintah kolonial. Kebijakan ini menimbulkan dampak sosial berupa meningkatnya beban kerja, hilangnya lahan pertanian rakyat, kerja paksa tanpa upah layak, serta kesenjangan antara elite lokal dan rakyat kecil (Sinaga, 2025). Secara ekonomi, Belanda memperoleh keuntungan besar hingga sepertiga pendapatan negaranya, sementara di Jawa terjadi krisis pangan dan kelaparan di beberapa daerah. Dari sisi politik, Tanam Paksa memperkuat kontrol kolonial melalui bupati dan kepala desa, sehingga perlawanan rakyat sulit berkembang.

Penderitaan yang dirasakan rakyat Jawa kemudian mendapat kritik keras dari mata dunia. Kritik internasional tersebut diperkuat oleh tulisan-tulisan kritis seperti karya Multatuli dalam Max Havelaar. Tulisan tersebut membuka mata masyarakat Eropa terhadap ketidakadilan kolonial. Akibatnya, Belanda tidak lagi bisa mengabaikan tuntutan perubahan. Dalam konteks inilah muncul gagasan bahwa pemerintah kolonial memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan penduduk jajahan. Untuk itu Belanda secara timbal balik memberikan kesejahteraan bukan semata-mata mengejar keuntungan ekonomi. Sebagai respons atas tekanan tersebut, Belanda memperkenalkan Politik Etis pada tahun 1901. Politik Etis didasarkan pada gagasan "utang kehormatan" atau eereschuld. sebuah keyakinan bahwa Belanda berhutang kepada rakyat Hindia Belanda atas kekayaan yang telah diambil selama masa kolonial. Kebijakan ini secara resmi menjanjikan perbaikan dalam bidang irigasi, edukasi, dan migrasi sebagai pilar utama pembangunan. Politik etis menekankan misi moral untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi. Meskipun secara teori Politik Etis bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam praktiknya kebijakan ini tetap sarat dengan kepentingan kolonial. Politik Etis bukanlah murni kebijakan kemanusiaan, melainkan strategi kolonial yang lebih halus dan sistematis.

Apabila dilihat dalam konteks Pulau Bali, Politik Etis melalui jalur kebudayaan muncul akibat adanya kecaman luar biasa dari mata internasional. Kecaman ini berisikan kritik terhadap kekejaman Belanda yang menyerang rakyat yang mempertahankan tanahnya hingga titik darah penghabisan. Menanggapi kecaman tersebut, Belanda menerapkan perhatian khusus terhadap aspek kultural di Bali, di mana pendidikan budaya menjadi lokus utama sementara sektor irigasi dan migrasi tidak mendapat perhatian signifikan. Pilihan kolonial untuk menjadikan budaya sebagai alat kontrol

sosial dan politik ini didasari oleh kalkulasi pragmatis yang matang. Setelah trauma Perang Puputan, Belanda menyadari bahwa dominasi militer yang telanjang (naked power) hanya akan menyuburkan benih-benih resistensi lokal yang fatalistik dan memperburuk citra diplomatik mereka di Eropa. Kebudayaan dipilih karena sifatnya yang lentur, subtil, dan bekerja langsung pada kesadaran subjek jajahan tanpa memicu alarm konfrontasi fisik. Dengan membingkai Bali sebagai wilayah berestetika dan berspiritual tinggi yang "rapuh dan perlu dilindungi" dari pengaruh Islam luar serta modernisasi sekuler, Belanda berhasil menggeser modus penaklukannya dari penundukan tubuh secara paksa menuju penjinakan mental secara halus. Konservasi terhadap apa yang dianggap sebagai "keaslian" Bali ini pada hakikatnya adalah pengebirian potensi politik masyarakat agar tetap terisolasi dalam ruang tradisi yang beku.

Politik budaya kolonial tersebut kemudian dinamakan *Baliseering* atau Balinisasi. Menurut Flierhaar, kebijakan Balinisasi ditetapkan pada tahun 1920 dengan tujuan awal meningkatkan kesadaran kaum muda atas kekayaan warisan budaya mereka melalui pendidikan bahasa, sastra, dan kesenian demi menekan arus modernisme yang dianggap tidak selaras (Picard, 2006). Dalam perspektif kritis, bagaimana program Balinisasi ini berhasil menghasilkan hegemoni adalah melalui mekanismenya yang bekerja secara "konsensus yang dipaksakan secara halus" (*coercive consent*). Hegemoni ini tercapai ketika masyarakat Bali, terutama generasi mudanya, secara sukarela mengadopsi, mempraktikkan, dan membanggakan identitas "statis" yang sebenarnya telah dirancang dan diseleksi oleh penjajah. Kolonial tidak bekerja sendirian; mereka memproduksi "rezim kebenaran" melalui aliansi strategis dengan para orientalis, seniman, dan antropolog Barat yang membingkai Bali sebagai pulau spiritual universal. Ketika masyarakat Bali menerima definisi bahwa diri mereka adalah makhluk estetik yang tidak membutuhkan—dan bahkan harus dijauhkan dari—politik modern, di situlah hegemoni bekerja sempurna. Otoritas tradisional direorganisasi ke dalam sistem pengawasan kolonial yang terbirokratisasi (Nordholt, 1996), sehingga pelestarian budaya ini tidak lagi bersifat netral, melainkan menjelma sebagai teknologi kekuasaan untuk mematikan nalar perlawanan terhadap kolonialisme. Melalui pembentukan lembaga resmi dan komite pemantau, pemerintah kolonial kemudian melakukan kategorisasi ketat mengenai budaya mana yang dianggap "otentik" (seperti tari klasik, seni ukir, dan arsitektur pura) dan mana yang "menyimpang", yang pada akhirnya membekukan dinamika sosial Bali demi memenuhi imajinasi estetis Barat.

Kebijakan *Baliseering* juga memperlihatkan bahwa pelestarian budaya dapat berfungsi sebagai bentuk *governmentality*, yaitu praktik pemerintahan yang bekerja melalui produksi pengetahuan dan pengaturan identitas sosial, bukan semata-mata melalui kekerasan. Dalam perspektif ini, kolonialisme mempertahankan dominasinya dengan membentuk cara masyarakat memahami kebudayaannya sendiri sehingga kontrol politik berlangsung melalui mekanisme budaya yang tampak alamiah (Foucault, 1991). Dengan demikian, pelestarian budaya dalam konteks kolonial bukan hanya tindakan konservasi, tetapi juga strategi untuk mengarahkan perilaku sosial dan membatasi kemungkinan munculnya identitas politik baru.

Kebijakan *Baliseering* tidak hanya berfokus pada pelestarian, tetapi juga pada pembentukan ulang kebudayaan yang diarahkan dari atas (top-down). Dalam mengoperasikan strategi ini agar dapat diterima tanpa kecurigaan, pemerintah kolonial secara cerdik melibatkan elite lokal Bali—baik dari kalangan bangsawan (Puri) maupun pemuka agama (Pedanda)—sebagai perpanjangan tangan birokrasi mereka. Elite Bali diposisikan sebagai "mitra pelestari" yang diberikan kembali hak-hak istimewa dan privilese tradisional mereka di dalam sistem pemerintahan tidak langsung (*zelfbestuur*), namun dengan syarat mereka harus patuh pada standarisasi adat yang ditetapkan Batavia. Para penguasa tradisional ini dilibatkan dalam mengawasi praktik budaya, mendokumentasikan kesenian, serta mengatur standar pertunjukan di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan elite ini bersifat simbiosis mutualisme yang semu: di satu sisi, para elite merasa kedaulatan budaya mereka dihormati dan dilindungi dari ancaman luar, namun di sisi lain, mereka sebenarnya sedang diperalat untuk melegitimasi rantai komando kolonial di tingkat akar rumput. Kolaborasi asimetris inilah yang menghasilkan struktur budaya yang terlembagakan secara administratif (Picard, 2006), di mana benda-benda budaya yang agung diawasi dan didaftarkan, sementara tubuh sosial masyarakat dikontrol sepenuhnya melalui tangan para pemimpin tradisional mereka sendiri.

Kebijakan Balinisasi tidak hanya berfokus pada pelestarian, tetapi juga pada pembentukan budaya. Pemerintah kolonial menyusun batas-batas kebudayaan yang dianggap mencerminkan "jati diri Bali". Kebudayaan diseleksi, komodifikasi dan standarisasi. Untuk itu Balinisasi lebih tepat dipahami sebagai

proses konstruksi identitas budaya yang diarahkan dari atas (*top-down*). Implementasi Balinisasi dilakukan melalui berbagai instrumen administratif dan kultural. Pemerintah kolonial mengawasi praktik budaya, mendokumentasikan kesenian, serta mengatur standar pertunjukan. Tentunya benda-benda budaya yang agung tidak luput dari pengawasan, pendaftaran dan pengumpulan. Tujuannya untuk diperlihatkan pada sarjana atau pengunjung dan sebagai upaya mencegah penjualan kepada turis (Picard, 2006). Kolaborasi ini menghasilkan struktur budaya yang terlembagakan dan dapat dikontrol secara administratif.

Regulasi juga tak luput dalam bidang agama, yang memfokuskan perhatian pada agama hindu di Bali. Agama hindu dijadikan identitas untuk masyarakat Bali. Menurut para orientalis, Bali merupakan museum hidup dari kebudayaan Hindu-Jawa. Bali juga dianggap sebagai tempat yang menampung warisan Hindu Majapahit semenjak tersapu ketika datangnya islam. Hal ini menjadikan anggapan agama Hindu adalah dasar dari masyarakat Bali. Agama Hindu juga sebagai penjamin keutuhan budaya dan mengilhami kegiatan seni didalamnya (Picard, 2006). Pelaksanaan upacara atau ritual kemudian digunakan pemerintah kolonial sebagai panggung representasi Bali. Berbagai upacara difoto, difilmkan, dan dipublikasikan sebagai bukti bahwa Belanda sukses menjaga kemurnian budaya di Pulau Bali.

Kemudian terdapat pula regulasi dalam bidang kesenian. Pemerintah kolonial menetapkan kategori seni yang dianggap representatif dalam program Balinisasi. Tujuannya untuk ditampilkan dalam acara resmi, pameran budaya, atau kunjungan. Seni tertentu yang dianggap terlalu bersifat sakral atau mengandung makna politis jarang tampil di ruang publik. Demikian juga seni yang memiliki durasi panjang dan kompleks mengalami komodifikasi untuk disesuaikan. Standarisasi seni pertunjukan ini sekaligus menciptakan batas yang jelas antara seni "sakral" dan seni "hiburan". Dalam bidang ini peran besar dari para orientalis yang mengembangan kesenian Bali. mulanya, masyarakat Bali berkesenian hanya berdasarkan pengabdian atau *ngayah*. Karya seni seperti gambar atau lukisan, patung atau relief dan diambil dari kitab Hindu. Karya-karya tersebut kebanyakan bersifat kolektif dan tidak ada upaya untuk melakukan pengakuan atas karya tersebut. Kedatangan para pelukis seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet melahirkan Yayasan Pita Maha yang menaungi pelukis bali. Berikutnya kedatangan pelukis Arie Smit juga mengorganisir anak muda berbakat di Desa Penestanan Ubud. Ari Smith membentuk organisasi Young Artist. Kumpulan yayasan dan organisasi semacam ini kemudian menaungi munculnya seniman Bali yang memberi kesadaran akan karya yang dihasilkan. Organisasi ini juga menjadi wadah pelukis dan pematung dalam pemasaran dan publikasi karya mereka (Parta, 2011). Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan seni Bali hingga era modern.

Bidang arsitektur tradisional juga tidak lepas dari regulasi kolonial. Pemerintah Belanda mengeluarkan aturan tata ruang desa, struktur pura, dan bentuk bangunan tradisional Bali. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman estetika arsitektur Bali. Selain itu juga menciptakan lanskap Bali yang sesuai dengan citra yang dikehendaki kolonial. Implementasi ini dilakukan terutama setelah gempa bumi 1917 di Bali. Gempa bumi ini menyebabkan banyak bangunan rusak dan korban jiwa. Menurut Noorwatha guna memperbaiki bangunan tradisional Bali pemerintah kolonial menetapkan proyek percontohan. Proyek ini bertujuan menetapkan standar estetika baru bagi arsitektur tradisional Bali. Proyek ini kemudian dikemas sebagai contoh kepedulian Belanda dalam melestarikan budaya tradisional Bali. Pemerintah kolonial menunjuk Pieter Moojen sebagai pengawas restorasi. Moojen kemudian memberikan standar atau batasan terhadap seniman Bali. Agama Hindu yang dijadikan dasar kehidupan masyarakat Bali dijadikan inspirasi. Untuk itu dipilih gaya arsitektur ala Kerajaan Gianyar atau gegianyaran. Bahkan gaya arsitektur ini membingkai stand Belanda saat pameran kolonial pada 1931. Hal ini menjadikan gaya gegianyaran mendominasi keragaman arsitektur Bali. Padahal, setiap wilayah di Bali memiliki ciri khas atau identitas arsitekturnya tersendiri (Krisnadi, 2023). Standarisasi ini tentu membuat bangunan di Bali terlihat sama dan asli seperti bayangan masyarakat Eropa. Balinisasi menunjukkan usaha pemerintah kolonial dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan citra yang dibentuk. Dalam hal ini Balinisasi menjadi strategi pengendalian sosial dan budaya. Kebijakan ini mencerminkan wajah kolonialisme yang tidak hanya mengandalkan kekerasan. Lebih dari itu, dapat juga dilakukan melalui manipulasi kebudayaan.

Pemerintah kolonial juga memantapkan Balinisasi melalui kebijakan dalam bidang pendidikan. Dalam setiap bidang pendidikan, identitas lokal Bali disematkan demi mendukung agenda Balinisasi. Kebijakan yang dilakukan kolonial diantaranya: pembangunan fisik sekolah yang menyematkan desain khas Bali, penugasan guru yang diambil dari seniman dan guru adat, buku ajar menggunakan bahasa Bali, serta pelajaran seni, olahraga

dan seragam sekolah menggunakan identitas budaya Bali (Supriyatna, 2022). Tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah membuat masyarakat Bali selaras dengan Balinisasi tanpa merasa didominasi atau keterpaksaan. Melalui bidang pendidikan Balinisasi secara halus menciptakan kesadaran terhadap generasi muda tentang kekayaan budaya yang dimiliki dan melestarikan budaya mereka (Pageh dkk., 2015).

3. Bali Sebagai Museum Hidup

Representasi Bali sebagai *living museum* juga menunjukkan bahwa warisan budaya memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan industri pariwisata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa destinasi wisata kolonial sering dibangun melalui proses seleksi terhadap simbol-simbol budaya tertentu yang dianggap memenuhi ekspektasi wisatawan internasional mengenai keaslian (*authenticity*). Dalam proses tersebut, kebudayaan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diproduksi kembali sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan politik (Salazar, 2012; Winter, 2007). Dengan demikian, konstruksi Bali sebagai ruang budaya yang autentik tidak hanya memperkuat legitimasi kolonial pada awal abad ke-20, tetapi juga menjadi fondasi bagi berkembangnya citra Bali sebagai destinasi wisata budaya hingga masa kini.

Secara teoritis, konsep museum hidup (living museum) menggeser paradigma museum konvensional yang cenderung statis— yaitu objek-objek masa lalu diisolasi di dalam etalase kaca dan dipisahkan dari interaksi sosial masyarakat—menjadi sebuah ruang preservasi aktif yang mengintegrasikan benda-benda budaya (*tangible)* dengan praktik tradisi yang masih terus dijalankan oleh manusia (*intangible*). Asal-usul konsep ini berakar dari gerakan ruang terbuka (open-air museum) di Skandinavia pada akhir abad ke-19 yang digagas oleh Artur Hazelius melalui pembangunan Museum Skansen pada tahun 1891, sebelum akhirnya diadopsi secara luas dalam studi warisan budaya (heritage studies) modern untuk melestarikan lanskap budaya, situs arkeologi, dan pemukiman adat yang utuh. Perbedaan mendasarnya terletak pada metode konservasi: jika museum konvensional berfokus pada pembekuan artefak mati yang telah terlepas dari konteks aslinya, *living museum* mempertahankan ekosistem kebudayaan agar tetap berfungsi secara organik di habitat aslinya. Namun, dalam konteks pariwisata kolonial di Bali, konsep ini mengalami deviasi politis; alih-alih menjadi ruang pelestarian yang dinamis, "museum hidup" justru sengaja digunakan oleh pemerintah Belanda sebagai instrumen untuk membekukan masyarakat Bali dalam ruang waktu yang statis dan steril dari modernitas demi memenuhi imajinasi estetis para pelancong Barat.

Program Balinisasi merupakan kebijakan kolonial terhadap sosial budaya masyarakat Bali. konstruksi ini dibangun melalui representasi kebudayaan yang menekankan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut adalah keindahan, keramahan, asli dan tradisionalis. Lebih tepatnya, proyek Balinisasi merupakan penataan ulang struktur adat, kesenian dan ritual agar selaras dengan visi dan tujuan kolonial untuk Bali. Tujuan utamanya adalah menciptakan citra Bali sebagai masyarakat yang harmonis, statis, dan tidak tersentuh modernitas. Dalam citra tersebut, Bali kemudian dikonstruksi menjadi museum hidup. Artinya, Bali adalah ruang terhadap tradisi kuno yang berlangsung utuh dan serasi. untuk itu, Bali sebagai museum hidup menjadi konstruksi yang memperkuat legitimasi Kolonial Belanda sebagai pelindung kebudayaan yang ada. Citra ini menjadi narasi tidak hanya untuk Bali namun juga mengatur cara dunia luar memahami Bali. Dalam hal ini Bali sebagai museum hidup menjadi representasi kolonial yang bekerja secara politis dan estetis dalam membentuk persepsi global terhadap Bali.

Bali sebagai museum hidup selanjutnya berfungsi sebagai landasan konseptual kebijakan kolonial dalam mengelola kebudayaan Bali. Melalui konstruksi ini, pemerintah kolonial menerapkan pelestarian adat dan budaya dalam agenda utama. Meski demikian, pelestarian ini tidak semata untuk menjaga adat dan budaya bali. Terdapat kepentingan untuk melakukan pelestarian adat dan budaya untuk distandarisasi. Maksudnya, kebudayaan dipertahankan harus dalam wujud aslinya seolah tidak boleh mengalami perubahan. Melalui latar belakang menjaga keaslian, kolonial kemudian memiliki ruang untuk mengintervensi kehidupan sosial budaya masyarakat Bali. Secara perlahan kebudayaan Bali seperti tata upacara, arsitektur dan ekspresi seni diawasi dan dikendalikan melalui representasi sebagai museum hidup. Bali sebagai museum hidup juga memberikan kuasa pada Kolonial Belanda untuk pemilahan tradisi. Antara tradisi satu dan lainnya dipilih dan dipertahankan sesuai anggapan layak dan otentik. Elemen lain yang tidak sesuai imajinasi kolonial tentang Bali yang asli akan diabaikan atau terpinggirkan. Dinamika sosial, perubahan historis, serta ekspresi budaya yang bersifat kritis atau adaptif terhadap modernitas juga dikesampingkan. Seleksi ini tentu saja menimbulkan bias kebudayaan. Praktik dan ekspresi budaya yang dianggap sesuai dengan imajinasi kolonial kemudian dipertahankan dan dipromosikan. Sementara bentuk-bentuk budaya lain yang bersifat

dinamis, kritis, atau adaptif terhadap perubahan justru dipinggirkan. Balinisasi tidak sekadar kebijakan budaya, tetapi merupakan praktik diskursif yang memproduksi pengetahuan tentang Bali sekaligus mengontrolnya, sebagaimana dijelaskan Foucault (1972) tentang relasi kuasa dan produksi wacana. Dengan demikian, Bali sebagai museum hidup tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proyek pelestarian budaya, melainkan sebagai mekanisme kekuasaan yang mengatur representasi Bali serta membingkai warisan budaya lintas generasi.

Mulanya Bali sebagai museum hidup difungsikan untuk memulihkan legitimasi kolonial di mata internasional. Ketika pelaksanaannya, ternyata dapat menjadi strategi ekonomi luar biasa bagi kolonial. Dalam konteks ini, pemerintah kolonial melihat Bali sebagai museum hidup memiliki potensi komersial. Tentunya potensi ini menjadi sumber daya kapitalisasi yang baru bagi kolonial. Dalam hal ini, gagasan Bali sebagai museum hidup memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan pariwisata Bali pada abad ke-20. Secara sistematis, Belanda kemudian membingkai Bali sebagai ruang budaya yang otentik. Bali juga digambarkan dengan imaji pulau surga terakhir yang masih belum terjamah pengaruh modernitas. Media kolonial memiliki peran sentral dalam membangun dan mengembangkan cita tersebut. Media publikasi seperti majalah, fotografi etnografis hingga berbagai dokumentasi visual secara intensif merepresentasikan Bali. Kesan eksotis, harmonis dan otentik Pulau Bali terus dipopulerkan demi menarik perhatian masyarakat Eropa. Representasi visual ini memperkuat daya tarik Bali di mata publik Eropa. Ketika itu, Eropa sedang mengalami kejenuhan akibat modernitas. Melihat yang demikian estetis, Bali sebagai museum hidup dengan imaji surga terakhir bagaikan permata yang berkilauan. Citra yang diproduksi dan disirkulasikan melalui media kolonial tersebut kemudian membangkitkan ketertarikan luas bangsa Eropa. Bali sebagai museum hidup selanjutnya dikemas menjadi komoditas simbolik bernilai ekonomi. Imaji Bali sebagai "surga terakhir" bukanlah realitas alamiah, melainkan konstruksi historis yang diproduksi melalui tulisan, fotografi, dan promosi kolonial (Vickers, 1989b).

Ketertarikan bangsa Eropa terhadap Bali kemudian memunculkan permintaan baru berupa perjalanan wisata. Perjalanan wisata kebudayaan menjadi tujuan utama dari bangsa Eropa. Perjalanan wisata ini sedikit berbeda dengan yang memfokuskan pada hiburan dan rekreasi. Wisata budaya dan alam Bangsa Eropa sangat penasaran dengan deburan ombak pantai tropis, kekayaan budaya dan keindahan sawah Pulau Bali yang terus membayangi media ketika itu. Ketertarikan tinggi dari bangsa Eropa tentu dimanfaatkan dengan baik oleh kolonial. Publikasi etnografis dan ilustratif seperti karya Covarrubias (1937) turut memperkuat citra Bali sebagai ruang budaya murni dan artistik. Secara bertahap, Bali mulai dipromosikan menjadi destinasi wisata. Pemerintah kolonial menawarkan pengalaman wisata budaya yang dikemas dengan estetis, artistik dan spiritual.

Guna mendukung masuknya pariwisata di Bali, Pemerintah Kolonial kemudian membangun berbagai infrastruktur pendukung. Pembangunan Bali Hotel pada 1928, jalur transportasi dan berbagai fasilitas publik dilakukan guna memfasilitasi mobilitas wisatawan. Awalnya pada 1914 saat kondisi Bali dianggap sudah cukup aman, Belanda mulai menempatkan tentara dengan petugas sipil. Ketika itu, Bali telah dapat dicapai dari Surabaya menggunakan kapal. Ketika 1914, Bali telah dibuka untuk pengunjung dari Eropa. Saat itu official tourist bureau atau biro pariwisata telah mengeluarkan *illustrated tourist guide to East Java*, Bali and Lombok. Terbitan ini memuat informasi yang sangat sederhana. Tidak ada informasi lengkap tentang Bali baik tentang keindahan alam atau masyarakatnya. Justru terbitan ini memuat ketidaknyamanan dalam perjalanan, wilayah-wilayah yang kurang menarik dan peringatan tempat yang kurang ramah. Kemudian pada 1923, biro pariwisata kembali menerbitkan *Short Guide to Bali*. terbitan ini memuat rekomendasi tempat wisata dan pengantar singkat tentang masyarakat Bali, sejarah, tradisi dan agama di Bali.

Tahun 1924, *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* atau KPM, membuka pelayaran mingguan melalui jalur Singapura, Batavia, Semarang, Surabaya, Buleleng hingga Makassar. Selanjutnya, perwakilan KPM Singaraja diangkat menjadi wakil official tourist bureau. Pengangkatan ini dikarenakan para perwakilan KPM dapat menyediakan jasa untuk wisatawan berupa taksi dan pramuwisata berbahasa inggris. Tahun 1927 biro pariwisata mulai rutin menerbitkan majalah bulanan. Majalah rutin ini berjudul *Tourism, A Monthly Bulletin of Information Relative to Travel in Dutch East Indies* (Picard, 2006).

Dalam majalah tersebut memuat jadwal acara keagamaan di Bali, termasuk ngaben atau upacara pembakaran mayat yang spektakuler. Beberapa kapal dijadwalkan secara khusus untuk menyesuaikan dengan waktu dilaksanakan berbagai upacara tersebut. Pariwisata budaya yang berkembang sejalan dengan Bali sebagai

museum hidup dan imaji Pulau surga terakhir. Untuk itu berbagai kesenian, upacara keagamaan dan kehidupan desa dipresentasikan untuk menunjang citra tersebut. Promosi perjalanan wisata ke Bali terus dilakukan oleh kolonial Belanda. Berbagai promosi yang dilakukan berhasil membuat bangsa Eropa semakin tertarik dengan Bali. Biro pariwisata mencatat ada 213 pengunjung pada 1924, jumlah ini meningkat tajam pada 1929 yang mencatat 1.428 turis yang datang ke Bali. Belanda membingkai Bali sebagai museum hidup dengan citra Pulau surga terakhir menjadi pintu masuknya pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata Bali pada masa awal tidak dapat dipisahkan dari produksi citra kolonial yang menempatkan kebudayaan Bali sebagai daya tarik utama dalam ekonomi pariwisata.

Promosi Bali tidak hanya dilakukan oleh media, juga dalam pameran budaya. Salah satunya yaitu Pameran kolonial di Prancis pada dekade 1930-an. Pameran tersebut bernama *Exposition Coloniale Internationale de Paris* tahun 1931. Pameran ini memiliki keterkaitan erat dengan awal pengembangan Bali sebagai daerah pariwisata. Dalam pameran tersebut, Hindia Belanda menampilkan Bali sebagai representasi utama kebudayaan Timur yang eksotis, harmonis, dan artistik. Seni tari, musik gamelan, arsitektur, serta citra religius Bali dipresentasikan kepada publik Eropa. Pameran ini menampilkan simbol kebudayaan yang "asli" dan belum tersentuh modernitas. Representasi ini bukan sekadar partisipasi pertunjukan budaya. Lebih dari itu tampilan Bali dalam pameran tersebut merupakan bagian dari strategi kolonial untuk membangun imajinasi visual tentang Bali sebagai ruang budaya ideal yang layak dikunjungi.

Pameran tersebut menjadi medium promosi internasional yang efektif bagi Bali. Tentunya karena memperkenalkan pulau Bali kepada khalayak Eropa dalam skala besar. Ketertarikan publik Eropa terhadap Bali pasca-pameran mendorong meningkatnya minat wisatawan, seniman, dan peneliti untuk datang langsung ke pulau Bali. Biro Perjalanan mencatat wisatawan yang berkunjung ke Bali pada 1939 rata-rata 3000 orang (Picard, 2006). Dengan demikian, Bali sebagai museum hidup dan pameran di Prancis pada 1930-an dapat dilihat sebagai titik penting dalam transformasi Bali. Mulanya sebagai objek etnografis kolonial hingga menjadi destinasi pariwisata internasional. Citra budaya yang dipamerkan di Eropa menjadi fondasi utama pengembangan pariwisata Bali pada masa awal.

Dalam konteks ini, Pariwisata Bali memang tidak berkembang atas inisiatif lokal. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri perpanjangan kolonial terhadap otentisitas budaya sesuai dengan ekspektasi wisatawan. Peran penting kolonial berhasil membentuk cara Bali dipersepsikan baik oleh dunia luar maupun oleh masyarakatnya sendiri. Kolonial menentukan otentisitas dan mempertahankannya melalui pengemasan ritual serta kesenian dalam format yang dipersingkat, terstruktur, dan mudah dikonsumsi. Hal ini menandai awal komodifikasi budaya Bali. Dalam kerangka Bali sebagai museum hidup, masyarakat Bali semakin diposisikan bukan semata sebagai subjek budaya, melainkan juga objek tontonan. Interaksi dengan wisatawan dimediasi oleh aturan kolonial yang mengatur bentuk dan cara pertunjukan budaya. Proses ini menunjukkan bahwa kolonialisme beroperasi tidak hanya melalui administrasi politik, tetapi juga melalui produksi makna, simbol, dan representasi yang membentuk pemahaman global tentang Bali. pada akhirnya konsep Bali sebagai museum hidup dapat dipahami sebagai wujud kolonialisme kultural yang mengatur persepsi sekaligus praktik kebudayaan di Bali.

4. Peran Aktor Kolonial dalam Membentuk Narasi Bali Sebagai Museum Hidup

Pembentukan narasi tentang Bali sebagai museum hidup tidak akan dapat dilakukan tanpa peranan aktor kolonial yang terdiri atas antropolog, seniman, dan birokrat. Dalam perspektif kritis, sinergi antar-aktor ini membentuk apa yang disebut sebagai *Colonial Knowledge Production* (Produksi Pengetahuan Kolonial)—sebuah proses sistematis di mana kekuasaan kolonial menciptakan, menyeleksi, mendokumentasikan, dan melembagakan pengetahuan tentang masyarakat jajahan demi melanggengkan kontrol geopolitik serta pasifikasi politik. Konstruksi ini dikembangkan melalui berbagai bidang seperti tulisan, karya seni, bahkan kebijakan administratif untuk membangun citra Bali sebagai sebuah masyarakat yang harmonis, statis, sekaligus layak dipertahankan. Antropolog dan peneliti kolonial memegang peran penting dalam menyediakan fondasi epistemik melalui penelitian terhadap etnografi, seni pertunjukan, sistem sosial, kepercayaan, hukum adat, dan struktur kekuasaan tradisional masyarakat Bali. Proses kanonisasi pengetahuan ini secara historis dirintis oleh Residen Liefrinck, yang secara struktural mengarahkan para peneliti untuk memetakan agama, kesenian, dan budaya Bali. Untuk mengunci dan menguasai memori kolektif tersebut, pemerintah kolonial mendirikan Gedung Kirtya pada tahun 1928 yang semula bernama Liefrinck-Kirtya van der Tuuk. Institusi ini didirikan dengan tujuan spesifik untuk menyimpan hasil-hasil penelitian, manuskrip lontar,

serta arsip kolonial Belanda, sehingga melalui lembaga inilah pengetahuan kolonial diproduksi secara sangat selektif demi kepentingan akademis Barat di Eropa.

Kajian-kajian etnografis yang lahir dari rahim produksi pengetahuan ini umumnya cenderung sangat selektif, mengabaikan dinamika konflik atau potensi gerakan politik modern, dan sebaliknya, membekukan tradisi Bali ke dalam kategorisasi teks yang kaku. Hal ini terlihat jelas dari publikasi ilmiah para orientalis terkemuka yang aktif menyumbangkan tulisan mereka. Walter Spies dan R. Goris, misalnya, melakukan penelitian mendalam yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul *Overzicht van Dans en Tooneel in Bali* dalam Majalah Djawa (1937), yang menyebutkan dan mengklasifikasikan berbagai jenis tarian serta teater di Bali berdasarkan fungsi sakral maupun sekuler. Berbagai jenis seni pertunjukan sakral maupun sekuler tersebut, termasuk dramatari, juga ditulis secara ekstensif oleh Beryl de Zoete dan Walter Spies dalam buku monumental mereka, *Dance and Drama in Bali*, yang membingkai kesenian Bali sebagai ekspresi spiritual yang murni dan terikat pada tradisi kuno. Di samping itu, J. Kats melalui tulisannya *Barong op Bali* dalam Majalah Djawa (1924) turut mengkodifikasi seni pertunjukan Barong yang ia sebut memiliki fungsi keagamaan sekaligus fungsi profan. Tidak ketinggalan, elite lokal seperti Tjokorde Raka Soekawati juga dilibatkan dalam sirkuit ini melalui tulisannya *De Sahnyang op* Bali dalam Majalah Djawa (1925), yang menjelaskan bahwa fungsi tari Sanghyang adalah untuk menghalau berbagai wabah penyakit yang mengganggu masyarakat pada sasih ke-6 dan ke-9. Sangat dapat disadari bahwa tanpa hasil kodifikasi para peneliti di atas, kolonial akan kehilangan instrumen ilmiah untuk merancang Bali, di mana hasil riset tersebut secara tidak langsung sukses mencitrakan Bali sebagai ruang budaya yang rapuh, statis, dan wajib dilindungi dari pengaruh modernitas.

Dalam ekosistem *Colonial Knowledge Production*, komodifikasi visual dan pembaruan kreativitas lokal digerakkan secara beriringan oleh para seniman untuk menerjemahkan teks ilmiah menjadi produk estetis yang persuasif. Para seniman, yang terdiri dari pelukis dan fotografer, bertugas menggambarkan Bali sebagai pulau yang damai, indah, dan kaya akan ritual dalam karya-karya mereka. W.O.J. Nieuwenkamp hadir sebagai pionir yang membangun imajinasi awal publik Eropa mengenai eksotisme kehidupan sehari-hari masyarakat Bali lewat lukisannya.



Gambar 1. Lukisan dengan judul Sawah (Rice Field) tahun 1940 Karya W.O.J Nieuwenkamp memperlihatkan aktivitas petani Bali
Sumber : *Dokumentasi Ariani*

Di wilayah Ubud, kesenian sebagai penyangga budaya Bali mulai diperkuat dan diarahkan secara institusional melalui lahirnya yayasan seni pertama di Bali, yaitu Pita Maha pada tahun 1936. Yayasan ini dimotori oleh elite lokal Tjokorde Agung Soekawati bersama para seniman Barat seperti Rudolf Bonnet, Walter Spies, serta maestro lokal I Gusti Nyoman Lempad dan seniman lukis lainnya di Ubud. Kehadiran Pita Maha menjadi ruang pertemuan hibrida yang sangat sentral antara nilai tradisi dan modernisme dalam memberikan arah perkembangan kreativitas seniman Bali. Di bawah kendali Tjokorde Agung Soekawati dan Rudolf Bonnet, prinsip kreativitas tradisional yang semula murni didasarkan pada nilai pengabdian (ngayah) dipertemukan dengan prinsip modern di mana seniman harus mampu hidup dari karya seninya dan menembus pasar internasional. Melalui gerakan Pita Maha, seni tradisional Bali dipromosikan ke luar negeri dan diekspor ke Eropa, sementara kreativitas seni lokal diarsiteki agar memiliki identitas modern yang terstandarisasi, yang pada akhirnya mengunci posisi Ubud sebagai pasar internasional seni budaya sekaligus daerah wisata utama yang masih dapat disaksikan hingga saat ini.

Representasi visual dan publisitas estetis ini diperluas oleh aktor kolonial lainnya melalui media fotografi dan sastra populer untuk membangun *geographical imagination* di benak masyarakat Barat. Gregor Krause,

seorang dokter Jerman yang bekerja untuk pemerintah kolonial, memainkan peran utama dalam suplai materi visual promosi pariwisata melalui penerbitan buku fotografinya pada tahun 1920 yang memuat 400 foto tentang tarian, upacara keagamaan, serta lanskap Pulau Bali yang estetis dan romantis. Romantisasi ini mencapai puncaknya melalui penerbitan literatur populer seperti karya Miguel Covarrubias, *Island of Bali* (1937), yang secara masif menggambarkan masyarakat Bali sebagai komunitas religius yang hidup dalam harmoni kosmologis sempurna dan terpisah dari modernitas. Bahkan, studi antropologi visual Margaret Mead dan Gregory Bateson, *Balinese Character: A Photographic Analysis* (1942), turut membingkai psikologi masyarakat Bali sebagai sistem budaya yang stabil, teratur, ajeg, dan memiliki pola perilaku yang asli. Seluruh karya seni, foto, dan literatur yang diterbitkan ini bertindak sebagai aparat diskursif yang menetapkan standar persepsi kolonial tentang Bali, sekaligus memperkuat konstruksi bahwa keharmonisan masyarakat Bali harus dilindungi dari modernitas sekuler agar keindahan tradisionalnya tidak sirna.

Sejalan dengan usaha pelestarian diskursif tersebut, pemerintah kolonial melalui para birokratnya mulai mentransformasikan narasi "museum hidup" menjadi kebijakan konkret dan membangun industri pariwisata secara struktural di hilir. Sejak masa pemerintahan Residen Liefrinck, pemerintah kolonial Belanda secara resmi mendorong perkembangan pariwisata di Indonesia melalui Keputusan Gubernur Jenderal tahun 1910-1912 atas terbentuknya *Vereeneging Toeristen Verkeer* (VTV) yang merupakan badan *official tourist bureau* pertama pada waktu itu. Korporatisasi pariwisata ini berlanjut dengan pendirian agen perjalanan (*travel agent*) di Jakarta pada tahun 1926 yang disebut dengan Lissone Lindoman (LISLIND). Pada tahun 1928, LISLIND dilebur menjadi NITOUR (*Nederlandsche Indische Touristen Bureau*) yang merupakan anak usaha dari maskapai pelayaran raksasa kolonial *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) bersama *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij* (KLM). Untuk mendukung kepentingan akomodasi dan logistik para wisatawan Eropa yang datang dengan ekspektasi menyaksikan "surga tropis yang tidak tersentuh", jaringan modal kolonial ini kemudian menyokong pembangunan penginapan modern pertama di Bali, yaitu Bali Hotel dan Kuta Beach Hotel.

Pada akhirnya, interaksi tripartit antara aktor kolonial ini menciptakan sebuah sirkuit produksi pengetahuan yang sempurna dan saling mengunci kebebasan dinamis masyarakat Bali. Antropolog menyediakan legitimasi ilmiah-akademis, seniman dan yayasan seni (Pita Maha) membangun daya tarik emosional dan panggung estetis, sementara birokrat menerjemahkannya ke dalam kebijakan konkret, penyaringan arsip (Gedung Kirtya), serta penyediaan infrastruktur kapitalistik (VTV, NITOUR, dan KPM). Melalui mekanisme *Colonial Knowledge Production* inilah, sebuah kebudayaan lokal berhasil direorganisasi, disaring, dan dikonstruksi dari atas (*top-down*) demi melayani kepentingan penguasa. Sinergi ini tidak hanya berhasil menciptakan gambaran Bali yang indah, tradisional, dan asli di mata internasional, tetapi juga terbukti ampuh sebagai strategi penjinakan politik untuk menutupi jejak kekerasan Perang Puputan di masa lalu serta membendung arus radikalisme nasionalisme modern dari Pulau Jawa.

5. Implikasi Upaya Kolonial Menjadikan Bali Sebagai Museum Hidup

Bali sebagai museum hidup merupakan strategi kolonial Belanda yang berdasarkan pandangan keunikan tradisi. Bali dipersepsikan sebagai daerah yang masih murni dan belum tersentuh modernitas. Untuk itu, keaslian Bali memerlukan perhatian khusus untuk dipertahankan. Pandangan ini bukan hanya karena ketertarikan akan budaya, namun juga kepentingan politik. Kolonial Belanda berupaya menciptakan wilayah yang stabil, mudah dikendalikan dan tidak menimbulkan gejolak perlawanan. Untuk itu upaya kolonial menjadikan Bali sebagai museum hidup selain untuk pelestarian budaya, juga mengatur wilayah dan masyarakat tetap utuh dalam batas yang tidak memberikan ancaman terhadap kolonial.

Implikasi Bidang Budaya

Implikasi dari kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali. Upaya mempertahankan citra Bali terlihat dari pengaturan pemerintahan, pembangunan, dan hubungan kekuasaan dengan elite lokal. Modernisasi diterapkan secara bertahap dan selektif, sementara struktur tradisional tetap dipertahankan sebagai alat kontrol. Akibatnya, Bali berkembang dalam kerangka yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Hindia Belanda. Perkembangan tersebut lebih lambat akibat dinamika perubahan yang dibatasi oleh kepentingan kolonial. Kondisi ini melahirkan berbagai implikasi jangka panjang. Implikasi ini hanya dirasakan pada masa kolonial, tetapi juga memengaruhi arah perkembangan Bali pada periode selanjutnya.

Bali sebagai museum hidup mendorong lahirnya praktik pelestarian budaya. Meski pelestarian ini dilakukan semata demi eksotisme dan selera pasar Eropa. Implikasi dari pelestarian ini tumbuhnya kesadaran dari masyarakat Bali akan kekayaan budaya yang dimiliki. Sejalan dengan kebudayaan Bali mendapat perhatian dan pengembangan secara tidak langsung. Guna mendukung konstruksi Bali sebagai museum hidup, pemerintah kolonial bersama etnografer dan seniman Eropa yang datang ke Bali juga mengembangkan kebudayaan Bali. Tentunya tidak semua kebudayaan yang ada mendapat perhatian untuk disebarluaskan. Kebudayaan yang dipilih dianggap paling representatif dan menarik secara visual. Dalam berbagai bidang seperti ritual keagamaan, seni tari, arsitektur pura dan upacara adat. Bidang tersebut diposisikan sebagai simbol keaslian budaya Bali yang harus dijaga dan dipertahankan dalam bentuk yang sama. Akibatnya, budaya Bali hanya berpusat pada satu jenis seperti arsitektur ala gegianyaran. Ekspresi budaya yang hibrid atau mencerminkan interaksi dengan modernitas cenderung terpinggirkan. Alasannya, Kolonial membingkai Bali sebagai museum hidup sebagai ruang yang murni dan statis. Apabila ditinjau, kebudayaan Bali tentunya mengalami proses adaptasi dan perubahan seiring interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Praktik budaya mengalami pergeseran fungsi yaitu dari kebudayaan yang sakral menjadi pertunjukkan dengan nilai tukar ekonomi.

Implikasi Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, konstruksi Bali sebagai museum hidup menjadi pondasi penting untuk pembentukan pariwisata berbasis budaya pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial dan pelaku pariwisata Eropa secara aktif mempromosikan Bali sebagai destinasi eksotis yang berbeda dengan wilayah lain. Demi menunjang fasilitas untuk kepentingan pariwisata, berbagai infrastruktur mulai dikembangkan. Fasilitas yang dibangun utamanya untuk mendukung mobilitas wisatawan. Pembangunan berbagai fasilitas penunjang seperti jalan raya, pelabuhan, hotel, dan restoran yang bertujuan mempermudah mobilitas serta menarik wisatawan asing, terutama Eropa. Pembangunan infrastruktur ini mendorong perubahan pola ekonomi masyarakat Bali. Awalnya masyarakat Bali dominan pada agraris menjadi mulai terlibat dalam sektor jasa dan pariwisata. Pembangunan fasilitas modern berjalan berdampingan dengan upaya mempertahankan citra Bali sebagai wilayah tradisional dan eksotis. Budaya Bali diposisikan sebagai daya tarik utama, sehingga tradisi, seni, dan kehidupan sosial masyarakat menjadi komoditas ekonomi yang mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Jika diperhatikan, dibalik pertumbuhan ekonomi akibat pariwisata, terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi pada masa kolonial. Hotel, restoran, dan sarana transportasi umumnya dimiliki dan dikelola kolonial atau investor asing, sementara masyarakat lokal lebih banyak berperan sebagai tenaga kerja. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan sering kali lebih banyak dinikmati oleh pihak eksternal, termasuk pemerintah kolonial, pengusaha asing, dan elite lokal tertentu, Meskipun demikian, keberadaan jalan dan fasilitas umum membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat Bali, seperti peluang berdagang, menjual hasil kerajinan, dan menyediakan jasa bagi wisatawan. Dengan demikian, pada konstruksi Bali sebagai museum hidup tidak hanya berfungsi sebagai ruang pelestarian budaya, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi baru.

Implikasi Bidang Politik

Dalam bidang politik, implikasi konstruksi Bali sebagai museum hidup dapat dilihat dari pengendalian kekuasaan secara tidak langsung. Politik tidak langsung yang disebut juga indirect rule. Politik tidak langsung ini adalah kolonial Belanda menggunakan penguasa lokal atau raja, sebagai perantara untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat (Sinaga, 2005). Politik ini berupaya mempertahankan raja dan bangsawan lokal sebagai penguasa simbolis. Kekuasaan politik sesungguhnya berada ditangan pemerintah kolonial dan bangsawan lokal hanyalah perpanjangan tangan. Hal ini berkaitan dengan upaya menjaga struktur kerajaan, hukum adat, dan lembaga tradisional agar tetap terlihat asli. Tentu saja sejalan dengan konstruksi Bali sebagai museum hidup yang ingin ditampilkan untuk dunia luar. Kebijakan ini lebih memudahkan kolonial Belanda mengontrol masyarakat. Demikian juga demi menjaga stabilitas kolonial dari perubahan sistem politik lokal secara drastis. Jika dilihat dari sisi lain, terdapat juga implikasi bagi masyarakat Bali dalam bidang politik. Pemerintahan tidak langsung menyebabkan keterbatasan kedaulatan politik masyarakat Bali. Penguasa lokal diawasi secara ketat dan harus menyesuaikan kebijakan dengan kepentingan Belanda. Akibatnya, hukum adat dan sistem pemerintahan dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan kolonial. Berkaitan dengan hal itu, fungsi politik tidak sepenuhnya demi kepentingan masyarakat Bali. Pelestarian sistem tradisional ini menghambat berkembangnya partisipasi politik modern

dan kesadaran nasional di Bali pada awal masa kolonial. Artinya, Bali sebagai museum hidup dalam bidang politik pada masa kolonial berperan sebagai sarana kontrol kekuasaan. Pelestarian tradisi dalam jalur politik digunakan untuk mempertahankan dominasi kolonial sekaligus membatasi perubahan politik yang lebih progresif.

Implikasi Bidang Sosial

Kemudian dalam bidang sosial, implikasi Bali sebagai museum hidup juga terlihat dari cara masyarakat Bali menjalankan dan mempertahankan tradisi. Berbagai tradisi dan adat istiadat secara aktif dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur sosial tradisional seperti desa adat, banjar dan sistem kekerabatan menjadi pondasi utama dalam mengatur hubungan sosial antarwarga. Melalui lembaga adat, nilai gotong royong, tanggung jawab bersama hingga solidaritas dan musyawarah tetap hidup dan dipraktikkan. Pelaksanaan upacara keagamaan, kegiatan sosial hingga penyelesaian konflik masih berdasarkan tradisi dan adat istiadat. Keseharian masyarakat Bali berlangsung secara alami sesuai identitas dan cara hidupnya. Hal ini menjadikan Bali benar-benar berfungsi sebagai ruang hidup budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Implikasi dalam bidang sosial juga dapat dilihat dari interaksi masyarakat lokal, pendatang dan wisatawan mancanegara. Interaksi ini tentunya membawa pengaruh sosial yang beragam. Secara pelan tapi pasti, interaksi ini menyebabkan perubahan pola komunikasi, gaya hidup dan pandangan terhadap dunia luar. Selain itu, masyarakat Bali juga dituntut mampu beradaptasi tanpa menghilangkan nilai adat yang telah mengakar kuat. Hal ini tentunya mendorong tumbuhnya sikap toleransi, keterbukaan dan kemampuan memilah pengaruh luar yang selaras dengan budaya lokal. Selanjutnya dari sisi lain, tantangan komersialisasi budaya dan pergeseran nilai juga tampak nyata. Untuk itu lembaga adat dan adanya kesadaran kolektif masyarakat sangat diperlukan guna menjaga keseimbangan pelestarian tradisi dan dinamika perubahan zaman.

Secara keseluruhan konstruksi Bali sebagai museum hidup membawa implikasi besar dalam berbagai bidang kehidupan. Bali berhasil mempertahankan tradisi, seni, adat, dan ritual keagamaan tanpa mengalami perubahan yang signifikan dalam praktik kehidupan masyarakatnya. Pelestarian budaya Bali tidak terlepas dari kepentingan kolonial, meski demikian kebijakan ini turut memungkinkan budaya Bali diwariskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Hal ini menjadikan kebudayaan Bali bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan suatu sistem hidup yang terus dijalankan, dimaknai, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Upaya yang luar biasa menjadikan budaya tetap bertahan dan relevan hingga masa setelah kolonialisme berakhir. Warisan konstruksi kolonial tentang Bali terus berpengaruh dalam industri pariwisata modern dan relasi global kontemporer (Hitchcock & Putra, 2007).

Kasus Bali menunjukkan bahwa representasi budaya merupakan salah satu mekanisme utama kolonialisme modern dalam mempertahankan kekuasaan setelah dominasi militer berhasil ditegakkan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kolonialisme tidak hanya menguasai wilayah dan sumber daya, tetapi juga mengonstruksi pengetahuan mengenai identitas budaya masyarakat jajahan. Oleh karena itu, *Baliseering* dapat dipahami sebagai bagian dari praktik colonial *heritage-making*, yaitu proses ketika warisan budaya diproduksi untuk mendukung stabilitas politik sekaligus membangun legitimasi kolonial. Perspektif tersebut memperluas kajian historiografi kolonial dengan menghubungkan sejarah politik, sejarah budaya, dan critical heritage studies dalam satu kerangka analitis.

KESIMPULAN

Penaklukan berdarah terhadap Kerajaan Badung dan Klungkung menimbulkan citra negatif bagi pemerintah kolonial Belanda di mata internasional. Penyebaran laporan dan dokumentasi visual mengenai kekerasan militer tersebut memicu kritik luas dari pers Eropa dan kalangan humanis internasional. Menanggapi kecaman tersebut, Belanda menerapkan perhatian khusus terhadap budaya yang ada di Bali. Tujuan utamanya adalah menciptakan citra Bali sebagai masyarakat yang harmonis, statis, dan tidak tersentuh modernitas. Dalam citra tersebut, Bali kemudian dikonstruksi menjadi museum hidup. Artinya, Bali adalah ruang terhadap tradisi kuno yang berlangsung utuh dan serasi. Konstruksi Bali sebagai museum hidup berfungsi sebagai strategi politik untuk meredam tekanan global, sekaligus memungkinkan Belanda menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*) dengan mempertahankan raja dan bangsawan lokal sebagai penguasa simbolis di bawah kendali kolonial.

Pada tahap selanjutnya, konsep Bali sebagai museum hidup tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemulihan legitimasi kolonial, tetapi juga berkembang menjadi strategi ekonomi yang signifikan. Pemerintah

kolonial melihat potensi komersial dalam pengemasan Bali sebagai ruang budaya yang otentik dan eksotis. Melalui pembingkaian sistematis, Bali dipromosikan sebagai "Pulau Surga Terakhir" yang belum tersentuh modernitas, sehingga konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan pariwisata Bali pada awal abad ke-20 dan menjadi sumber kapitalisasi baru bagi kekuasaan kolonial.

Balinisasi pada masa kolonial Belanda tidak bisa dipahami hanya sebagai upaya pelestarian budaya. Di balik kebijakan yang tampak "melindungi tradisi", terdapat kepentingan politik kolonial yang ingin menjaga stabilitas dan kontrol atas Bali tanpa harus selalu menggunakan kekuatan militer. Melalui pengaturan adat, pembatasan perubahan sosial, serta promosi citra Bali sebagai wilayah yang eksotik dan berbeda dari Jawa, pemerintah kolonial membentuk sebuah gambaran tentang Bali yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, kebudayaan bukan sekadar warisan, tetapi menjadi alat pengelolaan kekuasaan.

Konstruksi tersebut membuat Bali diposisikan sebagai semacam "museum hidup". Tradisi, seni, dan ritual dipertahankan, tetapi dalam kerangka yang telah diseleksi dan diarahkan. Apa yang dianggap "asli" sebenarnya telah melalui proses pemilihan: mana yang boleh tampil, mana yang perlu disesuaikan, dan mana yang harus dihindari. Citra Bali sebagai pulau yang harmonis, spiritual, dan artistik kemudian diperkuat melalui tulisan-tulisan etnografis, karya seni, dan promosi pariwisata pada awal abad ke-20. Gambaran inilah yang kemudian tersebar luas dan membentuk persepsi dunia tentang Bali.

Menariknya, citra tersebut tidak berhenti pada masa kolonial. Hingga hari ini, bayangan tentang Bali sebagai "surga terakhir" masih terasa kuat dalam promosi pariwisata dan dalam cara Bali dipahami secara global. Hal ini menunjukkan bahwa warisan kolonial tidak hanya tersimpan dalam arsip, tetapi juga hidup dalam imajinasi kolektif dan praktik sosial sehari-hari. Identitas Bali yang kita kenal sekarang sebagian terbentuk dari proses sejarah yang panjang dan tidak selalu netral.

Masyarakat Bali tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Di tengah intervensi kolonial, selalu ada ruang negosiasi. Para elite lokal, seniman, dan masyarakat adat tetap memiliki peran dalam menentukan bagaimana tradisi dijalankan dan ditampilkan. Dalam beberapa hal, kebijakan kolonial justru membuka ruang baru bagi perkembangan seni dan penguatan identitas budaya, meskipun tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh kekuasaan. Di sinilah terlihat bahwa hubungan kolonial tidak selalu hitam-putih, melainkan penuh tarik-menarik kepentingan.

Memahami Balinisasi secara historis membantu kita lebih kritis dalam melihat gagasan tentang "keaslian budaya". Tradisi bukan sesuatu yang beku dan murni, melainkan terus dibentuk oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi. Melalui pembongkaran kritis ini, studi ini menyodorkan temuan utama bahwa proyek *Baliseering* (Balinisasi) yang mengonstruksi Bali sebagai museum hidup bukanlah sebuah manifesto kultural yang netral, melainkan sebuah teknologi kekuasaan berlapis yang secara sengaja mengawinkan pasifikasi politik pasca-Perang Puputan dengan komodifikasi ekonomi pariwisata awal abad ke-20. Secara teoritis, studi ini memberikan kontribusi penting bagi diskursus *Colonial Knowledge Production* (Produksi Pengetahuan Kolonial) dan teori hegemoni, dengan menunjukkan bagaimana sebuah "museum hidup" dapat beroperasi sebagai aparatus tatakelola (*governmentality*) kolonial. Aparatus ini terbukti bekerja efektif dalam membekukan nalar radikal serta kesadaran nasionalisme modern masyarakat jajahan, sembari di saat yang sama memobilisasi agensi estetis mereka demi kepentingan kapitalisme global. Dengan kesadaran ini, kajian tentang Bali tidak berhenti pada romantisasi budaya, tetapi mampu melihatnya sebagai ruang hidup yang dinamis yang pernah berada dalam cengkeraman kolonial, namun terus bergerak dan beradaptasi hingga hari ini.

Konstruksi Bali sebagai museum hidup turut membentuk praktik pelestarian budaya yang sarat kepentingan kolonial, namun sekaligus membawa implikasi sosial dan kultural yang kompleks. Interaksi antara masyarakat lokal, pendatang, dan wisatawan asing mendorong perubahan dalam pola komunikasi, gaya hidup, serta pandangan terhadap dunia luar. Meskipun pelestarian budaya kerap diarahkan untuk memenuhi selera pasar Eropa, kebijakan tersebut turut memungkinkan tradisi, seni, adat, dan ritual keagamaan Bali tetap diwariskan secara berkesinambungan. Dengan demikian, kebudayaan Bali tidak sekadar menjadi warisan statis masa lalu, melainkan sistem hidup yang terus dijalankan dan dimaknai dalam dinamika zaman. Pada titik krusial inilah, analisis ini membawa implikasi historiografis yang signifikan bagi nalar penulisan sejarah Bali dan Indonesia. Studi ini berhasil meretakkan dominasi historiografi konvensional yang bias Eurosentris dan Orientalis—yang selama ini kerap mengurung Bali dalam narasi ahistoris sebagai pulau eksotis yang pasif—

dan menggantinya dengan model historiografi yang emansipatif. Historiografi baru ini menempatkan Bali bukan lagi sebagai subjek pasif tatapan Barat (orientalist gaze), melainkan sebagai arena kontestasi relasi kuasa yang aktif, di mana agensi lokal secara cerdik melakukan negosiasi, hibridisasi, dan resistensi subtil yang jejaknya masih terus mengonstruksi politik identitas Bali hingga era kontemporer.

REFERENSI

Agung, I. A. A. G. (1988). *Bali abad XIX*. Gadjah Mada University Press.

Anderson, B. R. O'G. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.)*. Verso.

Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (2000). *The tourist-historic city.* Elsevier. https://doi.org/10.4324/9780080519470

Covarrubias, M. (1937). *Island of Bali.* Alfred A. Knopf.

Creese, H. (2016). *Women of the Kakawin world: Marriage and sexuality in the Indic courts of Java and Bali.* Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315698083

Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge.* Pantheon Books.

Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (pp. 87–104). The University of Chicago Press.

Geertz, C. (1980). *Negara: The theatre state in nineteenth-century Bali*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400843381

Harkantiningsih, N. (2014). Pengaruh kolonial di Nusantara. *Kalpataru, 23*(1), 67–80. https://doi.org/10.24832/kpt.v23i1.51

Hitchcock, M., King, V. T., & Parnwell, M. (Eds.). (1993). *Tourism in South-East Asia*. Routledge.

Hitchcock, M., & Putra, I. N. D. (2007). *Tourism, development and terrorism in Bali.* Ashgate.

Howe, L. (2005). *The changing world of Bali: Religion, society and tourism.* Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203015421

Indah, M. S., Putri, D. M., & Setiaji, A. F. (2023). Representasi budaya Banyuwangi dalam Banyuwangi Ethno Carnival: Pendekatan teori representasi Stuart Hall. *Journal of Education, 3*(2), 32–42. https://doi.org/10.51903/education.v3i2.332

Jordaan, R. E. (1980). The tawan karang tradition in Bali. *Archipel, 20*, 123–144.

Krisnadi, L. A. (2023). *Baliseering as reductionism project: Vandana Shiva's ecofeminist approach*. In Proceedings of the 10th International Conference on Nusantara Philosophy (ICNP) (pp. 1–8). Universitas Gadjah Mada. https://doi.org/10.29037/digitalpress.49442

Mudhoffir, A. M. (2013). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Jurnal Sosiologi, 18*(1), 1–18. https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734

Nordholt, H. S. (1996). *The spell of power: A history of Balinese politics, 1650–1940*. KITLV Press.

Parta, I. W. S. (2011). Perkembangan seni rupa Pita Maha dalam konteks konstruksi kebudayaan Bali. *Mudra: Jurnal Seni Budaya, 26*(2), 181–192.

Picard, M. (2006). *Bali: Pariwisata budaya, budaya pariwisata.* Kepustakaan Populer Gramedia.

Pringle, R. (2004). *A short history of Bali: Indonesia's Hindu realm.* Allen & Unwin.

Raffles, T. S. (2014). *The history of Java (Original work published 1817).* Cambridge University Press.

Reid, A. (2015). *A history of Southeast Asia: Critical crossroads.* Wiley-Blackwell.

Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200 (4th ed.)*. Stanford University Press. https://doi.org/10.5040/9781350394582

Robinson, G. (1995). *The dark side of paradise: Political violence in Bali.* Cornell University Press.

Said, E. W. (1978). *Orientalism.* Pantheon Books.

Salazar, N. B. (2012). Community-based cultural tourism: Issues, threats and opportunities. *Journal of Sustainable Tourism, 20*(1), 9–22. https://doi.org/10.1080/09669582.2011.596279

Sinaga, R., et al. (2025). Dari tanam paksa ke politik etis: Dinamika kebijakan kolonial Belanda dan dampaknya terhadap masyarakat pribumi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(4).

Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203602263

Stoler, A. L. (2002). *Carnal knowledge and imperial power: Race and the intimate in colonial rule.* University of California Press.

Supriatna, N. (2022). Living museum sebagai sumber pembelajaran sejarah: Comparative studies in Bali and West Java. *Teori dan Praksis Pembelajaran IPS, 7*(1). https://doi.org/10.17977/um022v7i22022p42

Tarling, N. (Ed.). (1992). *The Cambridge history of Southeast Asia* (Vol. 2, The nineteenth and twentieth centuries). Cambridge University Press.

Taylor, J. G. (2009). *The social world of Batavia: Europeans and Eurasians in colonial Indonesia (2nd ed.)*. University of Wisconsin Press. https://doi.org/10.2307/jj.36032618

Van der Kraan, A. (1985). The Dutch–Balinese conflict, 1846–1849. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 141*(2–3), 246–270.

Vickers, A. (1989a). Bali rebuilt: Tourism and Balinese identity. *Asian Studies Review, 13*(1), 1–17.

Vickers, A. (1989b). *Bali: A paradise created*. Allen & Unwin.

Waterton, E., & Smith, L. (2010). The recognition and misrecognition of community heritage. *International Journal of Heritage Studies, 16*(1–2), 4–15. https://doi.org/10.1080/13527250903441671

Wiener, M. J. (1995). *Visible and invisible realms: Power, magic, and colonial conquest in Bali.* The University of Chicago Press.

Winter, T. (2007). *Post-conflict heritage, postcolonial tourism: Culture, politics and development at Angkor.* Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203946381

Winter, T. (2014). Heritage studies and the privileging of theory. *International Journal of Heritage Studies, 20*(5), 556–572. https://doi.org/10.1080/13527258.2013.798671